

Submitted 17 February 2024

Review 19 March 2024

Revised 16 April 2024

Accepted 19 Juni 2024

DOI. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i2.31803>

***Government Policy Strategy in Developing Tourism Villages
through Village-Owned Enterprises***
**Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Desa
Wisata melalui Badan Usaha Milik Desa**

Andina Elok Puri Maharani

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret
andinaelok@staff.uns.ac.id

Gumilang Chandra Shasmita Haningati

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret
gumilangcsh@student.uns.ac.id

Muhammad Arsyi Dewangga

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret
Arsyidewangga@student.uns.ac.id

Abstract

In Indonesia, the tourism sector is one of the field that supported community economic wellbeing. Development of tourism involve not only national scale but also local government which is the village. Development of tourism could be achieved through Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) which manifest in form of tourism village. However, there are several obstacles in the management of tourist villages implemented by BUMDES, including accessibility, difficulties in determining core BUMDES business activities, development strategies that only imitate trends, human resource factors and political factors. The development of tourist villages through BUMDES needs to pay attention to four important components including tourist attractions, availability of transportation, activities and tourist amenities. Based on this, the aim of this research is to explain how important it is to prepare a good planning program as stated in the regulations regarding Priority Use of Village Funds in 2023 based on Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. The method used in this research is Qualitative Descriptive, which focuses on the study of literature and legislation. The results of this Jurnal research show that there are the inhibiting factors that cause tourist villages managed by BUMDES to not run smoothly.

Keywords; Tourist Village, Village-Owned Enterprises, Economy.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstrak

Pada negara Indonesia bidang kepariwisataan menjadi salah satu bidang penunjang guna mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengembangan kepariwisataan tidak hanya berlaku untuk lingkup nasional saja, melainkan berlaku pula untuk lingkup terkecil pemerintahan yakni pada lingkup desa. Pengembangan wisata di desa dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diwujudkan dalam bentuk desa wisata. Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan desa wisata yang dilaksanakan oleh BUMDes diantaranya berupa aksesibilitas, kesulitan dalam menetapkan kegiatan bisnis inti BUMDes, strategi pengembangan yang hanya menirukan tren, faktor sumber daya manusia, dan faktor politik. Pengembangan desa wisata melalui BUMDes perlu memperhatikan empat komponen penting diantaranya adalah atraksi wisata (*attraction*), ketersediaan transportasi (*accessibility*), kegiatan (*activity*), dan amenitas wisata. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini yaitu guna menjelaskan betapa pentingnya penyusunan program perencanaan yang baik sebagaimana tertuang dalam aturan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 berdasarkan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yang berfokus pada studi literatur dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat faktor penghambat yang menyebabkan desa wisata yang dikelola oleh BUMDES tidak berjalan dengan lancar.

Kata Kunci; Desa Wisata, Badan Usaha Milik Desa, Ekonomi.

A. Pendahuluan

Indonesia, yang dikenal karena keindahan alamnya, keberagaman budayanya, dan tradisinya yang unik, memiliki potensi yang signifikan untuk pertumbuhan dalam sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana memiliki peran signifikan dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Pengelolaan ini berfungsi sebagai penyedia layanan rekreasi, olahraga, dan juga menciptakan peluang pekerjaan di sektor-sektor sekitar, termasuk perdagangan, transportasi, hiburan, jasa, dan telekomunikasi. Pengelolaan pariwisata menjadi faktor kunci dalam menentukan perkembangan sektor pariwisata. Semakin efektif sistem pengelolaan yang diterapkan oleh suatu wilayah, maka semakin meningkat daya tarik destinasi wisata tersebut.

Mengenai pengelolaan pariwisata, pemerintah menerapkan regulasi otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap wilayah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah termasuk pengembangan perekonomian. Selama

bertahun-tahun, pemerintah telah melaksanakan upaya pengembangan ekonomi di pedesaan melalui berbagai program. Namun, hasil yang diperoleh belum memuaskan sesuai dengan harapan bersama. Oleh karena itu, pemerintah saat ini mengambil pendekatan baru dengan maksud untuk merangsang dan menggerakkan ekonomi di pedesaan. Salah satu tindakan yang diambil adalah mendukung pertumbuhan ekonomi di desa melalui pemberdayaan kewirausahaan desa yang terstruktur melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kehadiran BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) dijelaskan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dapat dikatakan bahwa keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa sudah diakui sejak tahun 2004. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan peluang bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang berlaku di wilayah desa tersebut. Undang-undang tersebut membawa angin segar bagi BUMDes karena mengatur lebih rinci mengenai BUMDes. BUMDes ini dapat dikembangkan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat desa sendiri. Prinsip BUMDes yang didasarkan pada kekeluargaan diimplementasikan tidak hanya melalui relasi positif di antara anggota struktur organisasi, melainkan juga melalui penghormatan terhadap hubungan dengan lembaga lain. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan BUMDES mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Dengan optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa dapat mencapai tingkat mandiri yang tinggi dan berhasil mengatasi masalah kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹

Pemerintah Desa perlu merancang program-program yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, terutama dalam penggunaan dana desa yang telah diatur. Pedoman mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (2) Permendes 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023, bertujuan untuk mempercepat

¹Adis Purnama Dewi and Yulistia Devi, “Upaya BUMDES dalam Pengembangan Objek Pariwisata Green Bamboo Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam,” *SALAM: Islamic Economic Journal* 3, no. 2 (2022), <http://dx.doi.org/10.24042/slm.v3i2.15008>.

pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa. Salah satu fokusnya adalah Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memanfaatkan kewenangan Desa, termasuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMDes Bersama; pengembangan usaha ekonomi produktif yang diberdayakan oleh BUMDes/BUMDes Bersama; dan pengembangan Desa Wisata. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah entitas yang didirikan oleh pemerintahan desa dengan tujuan menjadi platform untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Tujuan utama dari keberadaan BUMDes di suatu wilayah adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan cara menciptakan lapangan kerja, mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, dan juga meningkatkan pendapatan desa secara keseluruhan. Pendirian BUMDes dimulai sebagai suatu strategi untuk menggunakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemerintah desa, dengan maksud melakukan inovasi dalam pembangunan desa. Fokus utamanya adalah pada upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa dapat digunakan oleh desa untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama, yang umumnya dikenal sebagai BUMDes. BUMDes, sebagaimana halnya bisnis lainnya, diharapkan dapat efektif mengelola dana yang diberikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai keuntungan melalui pengelolaan anggaran tersebut.²

Potensi desa yang dapat dimanfaatkan BUMDes di antaranya yaitu pengelolaan pariwisata di desa-desa dimana ini biasanya dirancang untuk menjadi desa wisata. Desa wisata merupakan hasil gabungan dari akomodasi, daya tarik wisata, dan fasilitas penunjang yang tersedia di dalam struktur kehidupan masyarakat. Ini berintegrasi dengan tradisi dan praktik masyarakat setempat. Ini adalah wisata yang meliputi tradisi, atraksi alam, pengalaman pedesaan yang lengkap dan elemen unik yang dapat menarik wisatawan. Pengembangan sektor pariwisata pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan

²Margaretta Andini Nugroho and Wahyuni, "Peran Bumdes Maju Jaya Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Masaran Munjungan," *Electronical Journal of Social and Political Sciences* 9, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i3.36133>.

identitas dan tradisi lokal, serta merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendistribusikan pendapatan secara merata di kalangan penduduk setempat. Desa wisata yang dikembangkan di suatu daerah dapat menjadikan kesejahteraan sosial masyarakat meningkat. Maka dari itu, setiap desa atau daerah harus menunjukkan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan dan diangkat guna mencapai produktivitas yang tinggi serta memberi nilai tambah demi membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.³ Dengan demikian, BUMDes tidak hanya menjadi entitas ekonomi, melainkan juga menjadi agen perubahan sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yakni pertama, apa tantangan pengembangan desa wisata melalui BUMDes? Dan kedua, bagaimana strategi optimalisasi pengembangan desa wisata melalui BUMDes?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menghimpun informasi mengenai status suatu gejala yang sedang terjadi atau ada ketika penelitian sedang dilakukan.⁴ Menurut Nana Sudjana, penelitian deskriptif juga dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa ataupun kejadian yang terjadi pada saat sekarang.⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder yang bersumber dari sumber literatur, seperti jurnal, buku, dan sebagainya. Data sekunder dapat di definisikan sebagai sebuah data dari dokumen-dokumen yang diperoleh melalui instansi yang berkaitan.⁶

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dalam pengumpulan data. Teknik kualitatif adalah pengumpulan data yang dapat diartikan atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, maupun gambar dari data yang sudah

³Dyas Syahlia Izmi and Ananta Prathama, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis BUMDES," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 3 (2023), <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8270>.

⁴ Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi," *Jurnal Diakom* 1, no. 2 (2018), DOI: 10.17933/diakom.v1i2.20.

⁵ Shinta Margareta, "Hubungan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Dengan Efektivitas Pengambilan Keputusan Pimpinan", Universitas Pendidikan Indonesia, (2013).

⁶ Dian Adhietya Arif, Djati Mardiatna, and Sri Rum Giyarsih, "Kerentanan Masyarakat Perkotaan Terhadap Bahaya Banjir Di Kelurahan Legok Kecamatan Telanipura Kota Jambi," *Majalah Geografi Indonesia* 31, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.22146/mgi.29779>.

diperoleh sebelumnya⁷. Selanjutnya, berkaitan dengan pengolahan data yang sebelumnya telah diperoleh pada penelitian ini menggunakan analisis penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah metode analisis yang menarik kesimpulan berdasarkan aturan atau premis yang telah disepakati sebelumnya,⁸ Menurut Bani, Penalaran deduktif merupakan sebuah proses berpikir logis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang suatu hal khusus berdasarkan premis-premis yang bersifat umum atau telah terbukti kebenarannya.⁹ Menurut Ramdani, penalaran deduktif merupakan proses penalaran yang berasal dari pengetahuan prinsip ataupun pengalaman secara umum yang kemudian mengarahkan penulis guna memperoleh kesimpulan akan suatu hal secara khusus.¹⁰

C. Tantangan Pengembangan Desa Wisata melalui BUMDes

Pariwisata berbasis masyarakat bukan sekadar kegiatan wisata biasa. Lebih dari itu, ia merupakan sebuah ekspresi diri bagi masyarakat setempat untuk menunjukkan identitas dan budayanya kepada dunia. Melalui pariwisata ini, terjadi proses pertukaran sosial yang mempertemukan wisatawan dengan masyarakat lokal. Interaksi ini membuka ruang untuk saling memahami budaya dan tradisi masing-masing. Lebih dari sekadar pertukaran, pariwisata berbasis masyarakat juga menjadi proses pembelajaran bagi wisatawan dan masyarakat. Wisatawan mendapat pengetahuan baru tentang budaya lokal. Sedangkan masyarakat belajar tentang dunia luar dan bagaimana mengembangkan potensi daerahnya.

Fokus pengembangan pariwisata berbasis masyarakat terletak pada destinasi pariwisata perdesaan, di mana aktivitas pariwisata semakin berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini menciptakan perspektif baru dalam industri pariwisata, di mana pengalaman yang diberikan kepada wisatawan tidak harus berasosiasi dengan kemewahan atau tingkat biaya tinggi, melainkan dapat

⁷ Sutama, "Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D " (Kartasura: Fairuz Media, 2012).

⁸ Ahmad Fadillah, "Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Matematis Siswa," *Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika (JTAM)* 3, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.31764/jtam.v3i1.752>.

⁹ Bani Asmar, "Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Penalaran Matematik Siswa Sekolah Menengah Pertama Melalui Pembelajaran Penemuan Terbimbing," 2011.

¹⁰ Yani Ramdani, "Pengembangan Instrumen dan Bahan Ajar untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi, Penalaran, dan Koneksi Matematis Dalam Konsep Integral," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 13, no. 1 (2012).

memberikan kesan dan pengalaman baru. Keberagaman daya tarik di suatu destinasi pariwisata akan memperkuat nilai pemasaran. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus pengembangan pariwisata di pedesaan telah ditujukan untuk memperkuat identitas lokal dan sebagai langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Desa wisata secara organik muncul dari struktur masyarakat dan kekayaan sumber daya, baik dari aspek sosial budaya maupun potensi pengembangan pariwisata.¹¹

Pengembangan Desa Wisata melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melibatkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar program ini dapat berhasil dan berkelanjutan. Beberapa tantangan utama termasuk aspek keuangan, aksesibilitas, manajemen sumber daya, partisipasi masyarakat, dan integrasi dengan sektor pariwisata secara keseluruhan. Dari segi keuangan, BUMDes seringkali dihadapkan pada keterbatasan dana untuk mengelola dan mempromosikan desa wisata. Pengembangan infrastruktur, pemasaran, dan pelatihan bagi masyarakat lokal membutuhkan investasi yang signifikan. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan dana yang cukup dan efisien menjadi tantangan utama. Tantangan dalam pengembangan Desa Wisata melibatkan masalah keterjangkauan yang perlu diatasi. Pemeliharaan dan peningkatan efisiensi jaringan transportasi menuju destinasi wisata saat ini menjadi aspek yang sangat krusial. Kemudahan dan kenyamanan dalam sistem transportasi adalah pilar utama bagi kesuksesan suatu atraksi wisata. Ketersediaan dan kualitas sarana transportasi yang memadai, termasuk infrastruktur jalan dan terminal, menjadi faktor penentu dalam menarik minat wisatawan.

Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi para wisatawan tetapi juga menambah daya tarik pengalaman mereka. Meskipun peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata kadang-kadang berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti polusi, emisi, kebisingan, dan kehilangan fungsi lahan akibat perluasan jalan atau terminal. Perkembangan layanan transportasi umumnya didorong oleh permintaan pasar. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

¹¹Ertien Rining Nawangsari and Leily Suci Rahmatin, "Tantangan dan Peluang Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Tamansari dalam Era Normal Baru," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 47, no. 1 (2021).

pendapatan masyarakat memicu kebutuhan akan mobilitas yang lebih tinggi, mendorong inovasi dan perluasan layanan transportasi. Namun, dalam konteks pariwisata liburan, hubungan ini menjadi lebih kompleks. Ketersediaan opsi transportasi yang terjangkau tidak hanya merespon permintaan, tetapi juga mampu menciptakan permintaan baru. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan pariwisata di berbagai daerah. Strategi pemasaran memainkan peran penting dalam mengarahkan preferensi wisatawan. Penetapan harga yang kompetitif dan promosi yang efektif dapat menarik wisatawan untuk memilih tujuan wisata yang sebelumnya tidak dipertimbangkan.¹²

Kurangnya Infrastruktur Pariwisata juga menjadi tantangan dalam pengembangan desa wisata. Fasilitas yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, seperti hotel, infrastruktur jalan, pelabuhan, sarana transportasi, bandara, dan sebagainya, masih terbatas di banyak wilayah. Dampaknya, aksesibilitas ke destinasi pariwisata di suatu daerah belum mencapai tingkat optimal, yang mengakibatkan biaya perjalanan wisata menjadi tinggi. Kualitas infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti toilet dan fasilitas lainnya, seringkali menjadi permasalahan. Fasilitas yang tidak memadai dapat menurunkan kenyamanan wisatawan dan berakibat pada citra negatif terhadap objek wisata. Konektivitas antar daerah juga menjadi kendala. Kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai menyebabkan biaya dan waktu yang tinggi untuk mengunjungi suatu objek wisata. Hal ini dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Kurangnya penerbangan langsung merupakan salah satu hambatan utama dalam infrastruktur pariwisata. Hal ini menyulitkan wisatawan untuk mencapai destinasi wisata yang diinginkan dengan mudah dan cepat.

Tantangan utama yang dihadapi oleh BUMDes adalah kesulitan dalam menentukan bisnis inti yang akan dijalankan. BUMDes terlibat dalam berbagai unit usaha, termasuk bisnis wisata desa, di mana sebagian besar unit bisnis tersebut tidak sesuai dengan inti bisnis BUMDes. Bahkan, unit usaha wisata desa juga tidak termasuk dalam bisnis inti BUMDes, namun mulai mendapatkan popularitas ketika sektor pariwisata sedang berkembang pesat. Oleh karena itu, pengembangan

¹² *Ibid.*

strategi untuk unit wisata ini lebih cenderung mengikuti tren yang sedang berlangsung di pasar. Pendekatan yang diterapkan lebih fokus pada promosi yang terjangkau melalui media sosial. Namun, upaya ini menjadi kurang efektif ketika semua upaya promosi hampir serupa dengan pesaing. Bahkan, di tingkat lokal, strategi ini belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan.¹³

Tantangan lain dalam pengelolaan BUMDes adalah masalah tenaga kerja. Meskipun kemampuan sumber daya manusia di desa tidak secara keseluruhan rendah, namun menemukan individu dengan kualifikasi yang cocok menjadi sesuatu yang sulit. Sebagai sebuah kelembagaan ekonomi yang baru, BUMDes memilih untuk mengandalkan sumber daya manusia yang terhubung dengan personil atau aparat desa. Beberapa faktor mendasari kondisi ini, antara lain adalah ketidakjelasan potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh BUMDes. Pengurus BUMDes memainkan peran krusial dalam pengembangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes di beberapa desa seringkali terjebak dalam formalitas. Kurangnya penggajian bagi pengurus dan minimnya motivasi untuk mencari sumber daya terbaik di desa membuat BUMDes hanya dianggap sebagai syarat formal untuk mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat. Selanjutnya, faktor politik juga memiliki dampak, di mana pihak yang berkuasa di desa cenderung menempatkan individu yang dapat diandalkan pada posisi strategis sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan di tingkat desa. Ini memberikan dukungan terhadap pandangan para ahli mengenai hubungan patron-klien di mana pihak yang berwenang di desa, seperti kepala desa, pamong desa, Dewan Perwakilan Desa, kepala dusun, dan mereka yang memiliki peran sejenis dianggap sebagai patron, sementara mereka yang menduduki posisi strategis seperti pengurus BUMDes dianggap sebagai klien. Dari perspektif profesional, individu yang memiliki kualifikasi terbaik di luar hubungan patron-klien juga melihat jabatan seperti pengurus BUMDes sebagai jabatan yang memiliki dimensi politis.¹⁴

¹³Asmuni et al., "Tantangan BUM DESA Mencari Identitas dan Pengembangan Bisnis Pariwisata Desa," *Majalah Ilmiah "DIAN ILMU"* 21, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.37849/midi.v21i1.238>.

¹⁴*Ibid.*

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kunci. Tantangan ini mencakup membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap konsep desa wisata, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan memastikan manfaat ekonomi dan sosial terdistribusi secara adil di antara penduduk setempat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kapasitas menjadi penting untuk memastikan partisipasi aktif dan berkelanjutan.

Integrasi dengan sektor pariwisata secara keseluruhan adalah tantangan lain. Desa wisata perlu terhubung dengan jaringan pariwisata yang lebih luas untuk meningkatkan visibilitas dan daya tariknya. Kerja sama dengan pihak swasta, pemerintah daerah, dan organisasi pariwisata menjadi kunci untuk memperluas peluang dan mendukung pengembangan desa wisata. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Wisnu Yuda Pratama pada tahun 2022 dengan judul Analisis Potensi Dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Desa di Kabupaten Probolinggo, didalamnya memuat mengenai beberapa aktor atau pihak yang memiliki peranan dalam pengembangan pariwisata desa.¹⁵

Data yang diperoleh dari Wisnu Yuda Pratama pada tahun 2022 tersebut bahwa kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci dalam mengembangkan potensi pariwisata desa. Dukungan dari pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sangatlah penting. Peran dan kontribusi beberapa aktor utama yakni Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT (57,72%) yang berperan merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata desa, Kemendes PDTT (70,66%) berperan dalam memfasilitasi pendanaan dan pendampingan teknis bagi desa wisata, Kepala Bidang Pariwisata Disporaparbud (51,54%) berperan dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan pariwisata desa di daerah, Kepala Disporaparbud (55,59%) berperan dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pengembangan pariwisata desa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (52,65%) berperan dalam mempromosikan desa wisata di tingkat nasional dan internasional, Pemerintah

¹⁵Wisnu Yuda Pratama, "Analisis Potensi Dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Desa Di Kabupaten Probolinggo," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (2023), <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4657>.

Kabupaten Probolinggo (62,14%) berperan dalam mendorong pengembangan pariwisata desa di wilayahnya.

Pemerintah desa, melalui otonomi desa, telah aktif berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata desa. Fungsinya tidak hanya sebagai perantara antara desa wisata dan Disporaparbud, tetapi juga sebagai penyedia dana pengembangan, pemberdayaan, dan penetapan desa wisata sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹⁶ Selain itu, rintangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan destinasi wisata di Indonesia, antara lain:

1. Minimnya akses, layanan dasar, dan sarana prasarana merupakan hambatan utama dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dapat membuat wisatawan tidak nyaman dan enggan untuk berkunjung;
2. Industri pariwisata terkenal dengan dinamika dan kompleksitasnya. Faktor-faktor seperti perubahan ekonomi, politik, sosial, dan teknologi dapat menciptakan ketidakpastian yang tinggi bagi investor dan pengusaha di bidang ini;
3. Isu sanitasi dan kesehatan;
4. Dampak bencana alam yang dapat menyebabkan penutupan pintu masuk ke Indonesia;
5. Keterbatasan penerbangan langsung dari pasar target ke destinasi pariwisata;
6. Kualitas fasilitas yang kurang memadai di destinasi pariwisata, seperti fasilitas toilet yang kurang baik;
7. Jarak yang signifikan antara berbagai objek wisata;
8. Kurangnya pemandu wisata yang mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, terutama selain bahasa Inggris;
9. Ketidakmerataan jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pariwisata di seluruh provinsi di Indonesia;
10. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dalam sektor pariwisata sehingga mencapai tingkat standar internasional.;

¹⁶*Ibid*

11. Keterbatasan pasokan tenaga kerja berkompetensi dan standar kualitas perusahaan.

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia dihadapkan pada berbagai rintangan dan kendala, antara lain:

1. Adanya tumpang tindih dalam regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Kekurangan kualitas sumber daya manusia (SDM);
3. Kurangnya efektivitas dalam komunikasi dan publikasi;
4. Ketersediaan infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata;
5. Kekurangan investasi yang masuk ke sektor pariwisata; dan
6. Kurangnya perhatian terhadap aspek lingkungan hidup dalam upaya pengembangan pariwisata.

D. Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata melalui BUMDes

Pada tingkat nasional, perlu adanya sinergi kebijakan antara desa, pariwisata, dan pertanian. Secara substansi, kebijakan-kebijakan tersebut menetapkan masyarakat, terutama di desa, sebagai fokus keberhasilan. Sebagai contoh, dalam konteks pengembangan ekonomi desa, melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengelola sektor pariwisata dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui desa wisata, dan memajukan sektor pertanian serta pariwisata melalui konsep agrowisata.

Pengembangan desa wisata memiliki kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung sektor pariwisata. Desa wisata memiliki karakteristik khusus, seperti keunikan daya tarik yang dimiliki oleh desa tersebut. Pengembangan tersebut diimplementasikan dengan pendekatan multidimensional dan berupaya menjadi integratif, melibatkan berbagai faktor seperti dimensi sosial, ekonomi, politik, psikologis, antropologis, dan teknis. Keseluruhan proses ini memperhitungkan dimensi masa lalu, kondisi saat ini, dan proyeksi ke depan.

Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan. Desa wisata bukan hanya tentang wisata alam, tetapi juga menampilkan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat

desa. Pendirian desa wisata merupakan langkah strategis dalam membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. Keberhasilan desa wisata berakar pada partisipasi dan usaha aktif masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan keharmonisan, penduduk desa berusaha untuk memajukan perekonomian mereka melalui perubahan desa menjadi tujuan wisata. Pengembangan desa sebagai destinasi wisata bukan hanya merupakan investasi yang berpotensi memberikan hasil jangka panjang bagi pemerintah, tetapi juga memanfaatkan sumber daya manusia dan alam yang telah ada. Hal ini mendorong pertumbuhan desa secara berkelanjutan dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, tujuan dari pengembangan desa wisata adalah untuk mengevaluasi produk wisata yang telah ada dan merencanakan pengembangannya secara lebih optimal.

Mengembangkan desa wisata membutuhkan strategi yang matang, termasuk merencanakan kegiatan menarik untuk memikat wisatawan. Rencana tersebut harus melibatkan penggalian potensi yang dimiliki oleh desa dan masyarakatnya, dengan harapan bahwa pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak positif yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan suatu destinasi wisata berkaitan erat dengan identifikasi dan pemanfaatan potensi wisata yang ada, dimulai dari tingkat daerah hingga tingkat terendah.

Untuk mencapai tujuan ini, perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara bersinergi antara pelaku usaha, industri pariwisata, dan pemerintah. Pengelolaan pariwisata yang baik dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Kerjasama ini memungkinkan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor pariwisata merencanakan, menyusun, dan memprogramkan desa wisata dengan memanfaatkan potensi masyarakat dan sumber daya desa secara optimal.



Bagan diatas yang merupakan tulisan dari Dwi Hastuti, Parmadi, Junaidi, Haryadi, Siti Hodijah, dan Heriberta pada tahun 2023 dalam jurnal nasional yang berjudul Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Penguatan Kelembagaan: Studi Kasus Danau Tangkas menyebutkan dalam meningkatkan perekonomian desa memerlukan dukungan dari kelembagaan kepariwisataan.¹⁷ Terdapat empat komponen yang mendorong pertumbuhan ekonomi desa, yaitu pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas, penguatan pasar, dan keberlanjutan. Kelembagaan kepariwisataan menjadi pendorong utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat, yang berperan dalam menciptakan inovasi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Tujuan kelembagaan pariwisata diharapkan dapat mencapai tingkat nasional dengan integrasi pemerintah, organisasi, pelaku pariwisata, dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan teknis.¹⁸

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memiliki peran strategis dalam membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan

¹⁷Dwi Hastuti et al., "Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Penguatan Kelembagaan: Studi Kasus Danau Tangkas," *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023), 10.53867/jpm.v3i1.88.

¹⁸*Ibid*

kesejahteraan masyarakat. Peran BUMDes tidak hanya terbatas pada pembangunan ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat desa. BUMDes berdiri atas semangat "dari desa, oleh desa, dan untuk desa". Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang beroperasi secara profesional untuk mengelola potensi ekonomi desa. BUMDes berakar pada potensi asli desa dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁹

Peran dari keberadaan BUMDES dapat ditentukan dengan teori organisasi politik, yang terdiri dari:²⁰

1. Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan publik, organisasi publik memiliki fokus pada tujuan keuangan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki tujuan utama memberikan layanan kepada masyarakat desa, namun tetap perlu mencapai keuntungan.

2. Sumber Pendanaan

Organisasi publik mendapatkan sumber pendanaan dari pajak, pinjaman, obligasi pemerintah, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penjualan aset negara, dan sumber lainnya. Sementara itu, sumber pendanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga diperoleh dari pemerintah, serta dari sisa hasil usaha atau laba/untung yang dihasilkan oleh BUMDES tersebut.

3. Laporan Pertanggungjawaban

Manajemen organisasi publik bertanggung jawab kepada masyarakat karena menggunakan dana publik. Di sisi lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tanggung jawab ganda kepada kepala desa dan masyarakat desa. Laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kinerja BUMDes.

¹⁹Kokok Putra Siswanda and Meirinawati, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mengembangkan Wisata Embung di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan," *Publika* 9, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p323-334> . hlm. 324–25.

²⁰*Ibid*, 327-328

4. Struktur Organisasi

Organisasi publik memiliki struktur birokrasi yang kaku, tegas, dan hierarkis. Struktur organisasi tersebut erat kaitannya dengan fungsi, strategi, dan tujuan organisasi. Di sisi lain, pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), struktur organisasi tetap bersifat hierarkis, namun lebih fleksibel dengan kemampuan untuk disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.

5. Karakteristik Anggaran

Ciri khas dari anggaran publik adalah pengumuman secara terbuka kepada masyarakat, memastikan transparansi sehingga mendapatkan kritik dan melibatkan proses musyawarah. Sama halnya dengan BUMDES, sifat transparan dari anggaran diberlakukan secara umum, dan informasi tersebut diakses oleh masyarakat secara luas.

Peran dan aktivitas yang mendukung peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Desa Wisata, antara lain :

1. Peran penyadaran (*conscientization*)

Peran penyadaran merupakan suatu proses pembentukan pemahaman dengan tujuan memengaruhi kesadaran dan perilaku melalui perencanaan tindakan dan implementasinya. Hal ini bertujuan agar masyarakat desa wisata dapat menyadari potensi yang dimiliki mereka untuk mengembangkan desa wisata yang dikelola oleh komunitas setempat. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan desa wisata. Ini disebabkan oleh kebutuhan dukungan masyarakat dalam menjalankan kegiatan desa wisata. Upaya peningkatan kesadaran bisa dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan, sosialisasi, serta demonstrasi nyata.

2. Pengorganisasian masyarakat (*community organizing*)

Peran organisasi masyarakat, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan, bertujuan untuk membantu masyarakat memahami serta menyadari kemampuan, kapasitas, dan kondisi lingkungannya. Melalui mobilitasi, masyarakat diharapkan mampu merespons permasalahan dan memenuhi kebutuhannya dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Oleh

karena itu, peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata memiliki peranan yang sangat signifikan dan penting untuk memastikan kelangsungan program tersebut.

3. Peran penghantaran sumber daya manusia (*resource delivery*)

Penghantaran sumber daya manusia adalah tindakan memberikan pemahaman dan panduan kepada masyarakat mengenai potensi yang dapat dimanfaatkan, dengan tujuan agar mereka dapat mengelola baik sumber daya alam maupun manusia.

BUMDES dalam keikutsertaannya mengembangkan Desa Wisata dapat memuat keempat komponen berikut didalamnya, yaitu:²¹

1. Atraksi (*Attraction*)

Objek atau elemen wisata yang menarik akan menjadi pusat daya tarik bagi pengunjung, mendorong mereka untuk mengunjungi tempat tersebut. Fenomena ini mencakup keberadaan atraksi wisata. Atraksi wisata dijelaskan sebagai komponen khusus yang dimiliki oleh suatu destinasi wisata dengan tujuan tertentu, sesuai dengan kondisi wisata tersebut, guna meningkatkan daya tarik dan menarik minat pengunjung. Atraksi wisata memiliki potensi untuk menghasilkan industri tersendiri, mendorong pengunjung untuk mengubah kunjungan biasa menjadi pengalaman yang luar biasa setelah melihat atraksi wisata yang tersedia.

2. Aksesibilitas (*Accessibility*)

Ketersediaan transportasi di wilayah pariwisata merupakan faktor krusial yang mendukung perkembangan sektor pariwisata. Aksesibilitas direalisasikan melalui kemudahan dalam layanan transportasi di area objek wisata, baik melalui infrastruktur jalan yang mudah diakses maupun ketersediaan sarana transportasi yang mendukung. Selain itu, dari perspektif yang berbeda, akses ini merujuk pada transferabilitas, yang merupakan kemudahan berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Ketika suatu wilayah mengalami keterbatasan dalam ketersediaan

²¹Faizatul Mahmudah, Neni Wahyuningtyas, and I Nyoman Ruja, "Peran Dan Strategi BUMDES Dalam Pengembangan Wisata Taman Cengkok Asri Di Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.56569>. hlm. 50-51.

aksesibilitas seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan jalan raya yang baik, maka menjadi sulit bagi para wisatawan untuk mencapai destinasi wisata di wilayah tersebut.

3. Aktivitas (*Activity*)

Activity dapat diartikan sebagai kegiatan yang sengaja dilakukan baik pada kawasan wisata maupun luar kawasan. Dalam konteks pariwisata, kegiatan ini dapat mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan atau penduduk setempat untuk menambah pengalaman mereka. Kegiatan tersebut seperti halnya aktivitas wisata alam, maupun berpetualang. Pentingnya "Activity" dalam konteks pariwisata adalah untuk meningkatkan daya tarik destinasi, memberikan pengalaman yang unik bagi pengunjung, dan menciptakan kesan yang berkesan.

4. Amenitas

Fasilitas yang memberikan keuntungan di dalam area pariwisata atau kegiatan tambahan mencirikan amenitas wisata. Amenitas ini tidak hanya mencakup pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menciptakan elemen baru yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Sektor pariwisata dapat menjadi mesin pendapatan cepat bagi desa. Hal ini dapat dicapai melalui penyediaan fasilitas akomodasi yakni homestay, vila, dan glamping dapat menarik wisatawan dan menghasilkan pendapatan bagi desa, layanan makanan dan minuman seperti restoran, kafe, dan warung makan yang menyajikan makanan khas desa dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan meningkatkan pendapatan desa, dan kegiatan wisata seperti desa wisata dapat menawarkan berbagai kegiatan wisata, seperti trekking, wisata alam, dan wisata budaya, untuk menarik wisatawan dan menghasilkan pendapatan. Seringkali, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam model pariwisata berbasis masyarakat. Sebagian besar pengeluaran wisatawan difokuskan pada akomodasi, makanan, dan minuman, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal melalui keberlanjutan pariwisata.

Dalam upaya pengembangan desa wisata dengan tujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, kreativitas menjadi aspek yang sangat penting dalam

merancang paket wisata yang menarik. Situasi ini memberikan kesempatan bagi penduduk setempat untuk memulai bisnis di sekitar area pariwisata. Kepuasan pengunjung dapat tercermin melalui elemen-elemen seperti objek menarik (*something to see*), aktivitas yang dapat dilakukan (*something to do*), dan produk yang dapat dibeli (*something to buy*).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, elemen *something to see* berupa daya tarik alam dan budaya yang memikat wisatawan. Sementara itu, aspek *something to do* dapat dilakukan dengan aktivitas dan pengalaman menarik yang ditawarkan kepada wisatawan. *Something to buy* dapat dihasilkan dari Produk kerajinan dan UKM lokal yang dapat dibeli wisatawan sebagai kenang-kenangan. Pengembangan aspek *something to do* dan *something to buy* di desa wisata dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dihasilkan desa, seperti hasil panen, bahan baku kerajinan, dan keahlian masyarakat, menyediakan produk kerajinan, kuliner khas, dan produk UKM yang berkualitas dan unik, kerjasama yang efektif antara pengelola wisata, BUMDes, dan masyarakat desa.

Pengembangan elemen *something to do* bisa diwujudkan dengan merancang paket wisata yang beragam dan menarik, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata edukasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata, seperti menjadi pemandu wisata, penyedia homestay, dan penjual souvenir. Sebagai tambahan, perkembangan bagian *something to buy* di desa wisata dapat dilakukan dengan membangun kerjasama yang kuat antara pengelola wisata, masyarakat, dan pemerintah dan menawarkan produk lokal yang unik dan berkualitas, seperti souvenir khas desa, hasil kerajinan tangan, dan produk kuliner.

Community Based Tourism (CBT) merupakan pendekatan ideal untuk membangun desa wisata yang berkelanjutan dan berdaya. CBT berfokus pada pemberdayaan komunitas dan pelestarian lingkungan sebagai landasan pengembangannya. Prinsip utama CBT yakni kepemilikan yang artinya desa wisata dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat, partisipasi yang artinya masyarakat secara aktif terlibat dalam semua tahap pengembangan desa wisata, keuntungan yang artinya manfaat ekonomi dari desa wisata dinikmati secara adil oleh masyarakat, dan kelestarian yang artinya desa wisata dikembangkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Pengembangan *Community Based Tourism* memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Dalam paradigma pariwisata berbasis masyarakat, penting untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengelola destinasi pariwisata dengan tujuan mencapai keberlanjutan pariwisata. Ini melibatkan partisipasi, keterlibatan, dan kesetaraan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi.²²

Community Based Tourism (CBT) merupakan strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. CBT memiliki tiga pilar utama:

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Melibatkan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bertujuan untuk memastikan keterlibatan dan tanggung jawab mereka terhadap hasil keputusan, serta untuk mencari solusi bagi setiap permasalahan yang muncul. Partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata mencakup dua perspektif, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi terkait distribusi manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata. Keputusan yang diambil dan disetujui oleh masyarakat mencerminkan keterlibatan mereka dalam proses serta kontribusinya untuk mengidentifikasi masalah dan potensi, kemudian menganalisisnya untuk mencapai solusi. Dengan demikian, keputusan yang berasal dari partisipasi masyarakat akan lebih memunculkan rasa tanggung jawab dari mereka yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Pendekatan partisipatif memastikan bahwa masyarakat menjadi pelaku utama dalam semua aspek pengembangan pariwisata, termasuk sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, pemantau, dan evaluator.
2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
Keterjaminan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata dapat terlihat melalui berbagai sektor jasa yang dapat

²²Dhimas Setyo Nugroho, "Community Based Tourism Tantangan Dusun Nglepen dalam Pengembangan Desa Wisata," *Pariwisata* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31294/par.v5i1.3217>.

dimanfaatkan oleh mereka. Salah satu elemen dalam manajemen pengelolaan yang menggunakan pendekatan *community-based tourism* adalah *Local Resource*, yang berarti sumber daya secara tradisional dikuasai dan dikelola oleh komunitas setempat. Dengan demikian, masyarakat dapat meraih keuntungan dan juga menjadi subjek dari program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang berbasis *community-based tourism*.

3. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

Memberikan pendidikan kepariwisataan kepada masyarakat lokal merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Salah satu elemen dalam manajemen pengelolaan yang menggunakan pendekatan *community-based tourism* adalah *Local Variety*, yang merujuk pada variasi kehidupan masyarakat lokal atau kehidupan yang berbeda, yang memerlukan sistem pengelolaan yang disesuaikan. Perlakuan yang sama tidak dapat diberikan karena masyarakat lokal yang paling akrab dengan situasinya. Oleh karena itu, memberikan edukasi tentang kepariwisataan kepada masyarakat lokal bertujuan agar mereka dapat memahami kondisi lingkungan di sekitarnya.

Desa Wisata menjadi area di pedesaan yang menampilkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian dan keunikan dari kehidupan pedesaan itu sendiri. Hal ini mencakup aspek sosial budaya, tradisi, aktivitas sehari-hari, serta struktur bangunan dan tata ruang desa yang khas. Desa Wisata juga menampilkan beragam kegiatan ekonomi yang unik dan menarik, yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari sektor pariwisata. Potensi ini meliputi berbagai elemen seperti atraksi wisata, akomodasi, kuliner khas, oleh-oleh, dan berbagai kebutuhan wisata lainnya. Dengan demikian, meningkatnya minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata yang menawarkan pengalaman alam pedesaan menciptakan peluang pasar yang menjanjikan bagi pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata membawa potensi sebagai sumber pendapatan bagi desa dan penduduknya, menciptakan lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap kebudayaan melalui pengenalan dan promosi

kebudayaan dan kesenian setempat. Ketiga aspek ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak Ekonomi

- a. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah terjadi melalui pengeluaran serta biaya yang dikeluarkan oleh para wisatawan selama perjalanan dan kunjungan, seperti biaya akomodasi, konsumsi makanan dan minuman, pembelian souvenir, transportasi, dan elemen lainnya. Terlebih lagi, fenomena ini juga mendorong pertumbuhan dan peningkatan dalam sektor pembangunan lainnya. Salah satu ciri khas utama pariwisata adalah ketergantungannya dan hubungannya dengan sektor pembangunan lain. Oleh karena itu, perkembangan pariwisata akan memberikan dorongan terhadap peningkatan dan pertumbuhan di sektor pembangunan lainnya.
- b. Pengembangan pariwisata memiliki dampak positif terhadap perluasan peluang usaha dan lapangan kerja. Kesempatan ini muncul karena adanya permintaan dari para wisatawan. Oleh karena itu, kunjungan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi penduduk setempat untuk terlibat dalam bisnis seperti hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan, dan sejenisnya. Peluang-peluang bisnis ini tidak hanya memberikan kesempatan pekerjaan bagi masyarakat lokal tetapi juga meningkatkan pendapatan mereka, yang pada gilirannya mendukung kehidupan keluarga mereka.

2. Dampak Sosial

Semakin meluasnya peluang pekerjaan terjadi pada sektor-sektor yang melibatkan fasilitas dan layanan seperti hotel, restoran, dan perusahaan perjalanan yang merupakan jenis usaha yang memerlukan banyak tenaga kerja. Bisnis-bisnis ini memerlukan banyak tenaga kerja untuk beroperasi, dan semakin banyaknya kunjungan wisatawan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Di Indonesia, sektor-sektor yang paling menyerap tenaga kerja secara langsung dan signifikan termasuk perhotelan, agen perjalanan, pemandu wisata, dan lembaga pariwisata pemerintah yang membutuhkan sumber daya manusia yang terampil. Pariwisata juga

memberikan dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor yang tidak langsung terkait, seperti konstruksi dan perbaikan infrastruktur jalan.

3. Dampak Kebudayaan

- a. Menggalakkan pelestarian budaya dan warisan sejarah adalah tujuan utama. Indonesia kaya akan berbagai tradisi, seni, dan warisan sejarah yang bukan hanya menjadi daya tarik bagi pariwisata, tetapi juga menjadi modal utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Oleh karena itu, upaya pengembangan pariwisata akan difokuskan pada pelestarian, perlindungan, dan pengembangan modal utama tersebut agar tetap terjaga dan dapat berkembang.
- b. Mendorong pelestarian lingkungan hidup menjadi fokus. Keberagaman dan kecantikan alam, seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau, pantai, dan sejenisnya, menjadi daya tarik bagi pariwisata. Keindahan ini perlu dijaga dan dilestarikan secara berkelanjutan, karena merupakan aset penting bagi bangsa dalam upaya pengembangan sektor pariwisata.
- c. Para pengunjung selalu menikmati pengalaman yang otentik dan unik. Hal ini mendorong masyarakat untuk merawat dan mempertahankan keunikan dan keaslian budaya mereka agar dapat ditampilkan kepada wisatawan.

E. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan diatas, yaitu dengan adanya tantangan pengembangan desa wisata melalui BUMDES yakni aksesibilitas, menetapkan kegiatan bisnis inti BUMDES, strategi pengembangan yang hanya mengikuti tren, faktor sumber daya manusia, dan faktor politik. Aksesibilitas berkaitan dengan ketersediaan dan pengembangan kualitas transportasi yang perlu menjadi perhatian khusus karena menjadi faktor pembangkit daya tarik Desa Wisata. Menetapkan kegiatan bisnis inti yang akan dijalankan juga merupakan sebuah persoalan karena tidak semua unit usaha sesuai dengan inti bisnis dari BUMDES. Strategi pengembangan desa wisata cenderung mengikuti tren yang sedang terjadi di pasar sehingga tidak bisa bersaing dengan desa wisata lainnya dan tidak

mendatangkan keuntungan. Kemudian, sumber daya manusia yang digunakan oleh BUMDES cenderung mempunyai koneksi dengan aparat desa. Faktor politik dapat dilihat dari sudut pandang pihak penguasa desa yang akan menempatkan orang kepercayaannya pada posisi yang strategis, hal ini dilakukan oleh penguasa untuk menjaga kekuasaannya di level desa. Kelembagaan kepariwisataan memegang peran sentral dengan empat komponen fundamental yakni pengembangan kelembagaan daerah, peningkatan kapasitas, penguatan pasar, dan keberlanjutan. BUMDES menjadi kekuatan yang berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui keseimbangan antara layanan dan keberlanjutan perekonomian.

Strategi optimalisasi pengembangan desa wisata melalui BUMDES dengan memperhatikan empat komponen diantaranya adalah atraksi wisata (*attraction*), ketersediaan transportasi (*accessibility*), kegiatan (*activity*), dan amenitas wisata. Pengembangan desa wisata sangat disarankan untuk mengaplikasikan konsep *Community Based Tourism* (CBT) sebagai dasar pembangunan desa wisata. Pengembangan CBT memerlukan perhatian dan partisipasi dari masyarakat desa.

F. Saran

Berbagai tantangan dalam pengembangan Desa Wisata melalui BUMDES dapat diatasi dengan adanya investasi dalam perbaikan infrastruktur transportasi dan jaringan akses ke destinasi Desa Wisata. Pemerintah daerah dapat turut serta berperan aktif dalam pengembangan akses jalan serta penyediaan dan kelayakan transportasi umum yang efisien. Selain itu, BUMDES harus lebih berfokus pada bisnis inti yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Dalam menentukan pengelola sebaiknya BUMDES mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia tanpa terpaku pada hubungan personal. Diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDES sehingga dapat terhindar dari pengaruh politik. Pemilihan pejabat BUMDES juga harus didasarkan kepada kriteria profesionalitas dan kontribusi nyata terhadap pengembangan desa, sehingga dapat tercipta lingkungan yang kondusif dan sejahtera bagi masyarakat desa. Masyarakat desa juga harus berperan secara aktif dan memberikan perhatian

khusus terhadap pengembangan desa wisata melalui konsep *Community Based Tourism* (CBT).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Arif, Dian Adhietya, Djati Mardiatna, and Sri Rum Giyarsih. "Kerentanan Masyarakat Perkotaan Terhadap Bahaya Banjir Di Kelurahan Legok Kecamatan Telanipura Kota Jambi." *Majalah Geografi Indonesia* 31, no. 2 (2017). hlm. 79–87. <https://doi.org/10.22146/mgi.29779>.
- Asmar, Bani. "Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Dan Penalaran Matematik Siswa Sekolah Menengah Pertama Melalui Pembelajaran Penemuan Terbimbing," (2011). <https://doi.org/10.37849/midi.v21i1.238>.
- Asmuni, Risa Fitriyani, Wulan Prihatin, and Khoirotul Fitriya. "Tantangan BUM Desa Mencari Identitas dan Pengembangan Bisnis Pariwisata Desa." *Majalah Ilmiah "DIAN ILMU"* 21, no. 3 (2021). hlm. 60–74. <https://doi.org/10.37849/midi.v21i1.238>.
- Dewi, Adis Purnama, and Yulistia Devi. "Upaya BUMDES dalam Pengembangan Objek Pariwisata Green Bamboo terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam." *SALAM: Islamic Economic Journal* 3, no. 2 (2022): 174–95. <http://dx.doi.org/10.24042/slm.v3i2.15008>.
- Fadillah, Ahmad. "Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Matematis Siswa." *Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika (JTAM)* 3, no. 1 (2019). hlm. 15–21. <https://doi.org/10.31764/jtam.v3i1.752>.
- Hastuti, Dwi, Parmadi, Junaidi, Siti Hodijah, and Heriberta. "Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Penguatan Kelembagaan: Studi Kasus Danau Tangkas." *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023). hlm. 37–48. [10.53867/jpm.v3i1.88](https://doi.org/10.53867/jpm.v3i1.88).
- Izmi, Dyas Syahlia, and Ananta Prathama. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis BUMDES." *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 3 (2023). hlm. 329–36. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8270>.
- Mahmudah, Faizatul, Neni Wahyuningtyas, and I Nyoman Ruja. "Peran Dan Strategi BUMDES Dalam Pengembangan Wisata Taman Cengkok Asri Di Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023). hlm. 45–58. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.56569>.
- Margareta, Shinta. "Hubungan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Dengan Efektivitas Pengambilan Keputusan Pimpinan." Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- Nawang Sari, Ertien Rining, and Leily Suci Rahmatin. "Tantangan dan Peluang Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Tamansari dalam Era New Normal Baru." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 47, no. 1 (2021): 91–104.
- Nugroho, Dhimas Setyo. "Community Based Tourism Tantangan Dusun Nglepen dalam Pengembangan Desa Wisata." *Pariwisata* 5, no. 1 (2018). hlm. 42–55. <https://doi.org/10.31294/par.v5i1.3217>.
- Nugroho, Margaretta Andini, and Wahyuni. "Peran Bumdes Maju Jaya Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Masaran Munjungan." *Electronical Journal of Social and Political Sciences* 9, no. 3 (2022). hlm. 264–73.

- <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i3.36133>.
- Pratama, Wisnu Yuda. "Analisis Potensi Dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Desa Di Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 3 (2023). hlm. 41–55. <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4657>.
- Ramdani, Yani. "Pengembangan Instrumen dan Bahan Ajar untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi, Penalaran, dan Koneksi Matematis dalam Konsep Integral." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 13, no. 1 (2012). hlm. 44–52.
- Siswanda, Kokok Putra, and Meirinawati. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mengembangkan Wisata Embung di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan." *Publika* 9, no. 3 (2021). hlm. 323–34. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p323-334>.
- Sutama. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Kartasura: Fairuz Media, 2012.
- Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi." *Jurnal Diakom* 1, no. 2 (2018). hlm. 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.

Peraturan Hukum

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Permendes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023.